



Pansus Akan Panggil Wajib Pajak

Klarifikasi Piutang Pajak Daerah Temuan BPK

YOGYAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Kota Yogyakarta menjadwalkan memanggil pihak wajib pajak yang masuk dalam temuan audit BPK.

"Kemungkinan pekan depan kami akan panggil wajib pajak untuk dimintai klarifikasinya," kata Ketua Pansus LHP BPK

Nasrul Khoiri kemarin.

Sejak dibentuk pekan lalu, pansus telah memanggil tim auditor BPK dan pihak eksekutif. Seluruhnya telah dimintai klarifikasi atas temuan potensi pendapatan daerah Kota Yogyakarta 2016 dari sektor pajak daerah yang kurang bayar.

Rencana memanggil pihak wajib pajak untuk mengetahui apa alasan mereka tidak men-

jalankan kewajibannya membayar pajak daerah. Sebabnya, temuan BPK ini berpotensi merugikan keuangan daerah yang nilainya mencapai miliaran rupiah dan tak menutup kemungkinan menjadi temuan pidana jika tak ditindaklanjuti secara serius.

"Semangat kami membentuk pansus adalah mengawal dan mendorong Pemkot agar

bisa menjalankan rekomendasi BPK secara tuntas. Pansus tak ingin temuan BPK terulang pada tahun berikutnya," kata Nasrul.

Namun, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta itu belum memastikan apakah seluruh wajib pajak yang masuk dalam LHP BPK akan dipanggil seluruhnya atau hanya sebagian saja. Sebabnya, wajib pajak yang mangkir dari kewajibannya itu

tidak hanya dari satu kalangan saja. Ada wajib pajak dari penyelenggara reklame hingga sektor perhotelan dengan jumlah mencapai belasan wajib pajak.

Sejauh ini, dua temuan BPK yang mencuat adalah tunggakan pajak reklame yang mencapai Rp953 juta dan pajak hotel yang mencapai Rp1 miliar.

Ke Hal 10

(Dari Hal 9

BPK merekomendasikan agar Pemkot menagih seluruh tunggakan pajak tersebut agar tak menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistiyono men-

dukung kerja pansus untuk mengawal dan mengontrol jajarannya menindaklanjuti temuan serta rekomendasi BPK. Pihaknya pun sejauh ini telah menjalankan rekomendasi BPK, tapi belum seluruhnya tuntas.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005